



REVISI RENCANA KERJA 2023

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No. SK. 56 / BPKHTL.VII/TU/DIPA/12/2023

T E N T A N G

REVISI RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya perubahan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar, perlu disusun dan ditetapkan Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

/10. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 TAHUN 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Taat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. /MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
21. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 Tentang Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;.
22. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor SK. /BPKH.VII/TU/12/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor SK.52/BPKHTL.VII/TU/12/2022 Tentang Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.

/MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR TENTANG REVISI RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2023.
- KESATU : Revisi Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



MARYUNA PABUTUNGAN
NIP. 19670919 199303 2 004

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di - Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di - Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di - Jakarta
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku selaku Koordinator UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan di - Makassar
6. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara XXIII di - Makassar
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I di - Makassar
8. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku selaku Koord. UPT Kementerian LHK di Makassar
9. Masing-masing Bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : SK.56/BPKHTL.VII/TU/DIPA/12/2023
Tanggal : 11 Desember 2023

TENTANG

REVISI RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Rencana Kerja ini memuat gambaran secara garis besar kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Tahun 2023 selama satu tahun. Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan ini disusun mengingat isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional, maka memungkinkan dalam tahap selanjutnya Renja BPKHTL Wilayah VII Makassar mengalami penyesuaian.

Revisi Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2023 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar.

Akhirnya semoga Revisi Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.



Makassar,
Kepala Balai

Desember 2023

Ir. Maryuna Pabutung, S.Hut., M.P
NIP. 19670919 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3. Struktur Organisasi dan SDM.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2021	9
2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Tahun 2022	9
2.1.1 Capaian Tahun 2021	9
2.1.2 Capaian Tahun 2022	13
2.2 Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	18
2.2.1 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021	18
2.2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.....	20
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	22
3.1 Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023	22
3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, Elemen Kegiatan Tahun 2023 .	24
BAB IV PENUTUP	31
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2023	vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2021	9
Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2022 setelah adanya refocusing anggaran.....	14
Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021.....	19
Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.....	20
Tabel 5. Dukungan BPKHTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional	23
Tabel 6. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 7. Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Makassar TA 2023 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	28
Tabel 8. Sebaran KRO-RO pada Renja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Pembangunan (Tujuan) LHK tahun 2023.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar	6
Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar	6
Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Golongan.....	7
Gambar 5. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wil. VII Makassar Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 6. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Terakhir (2018 - Desember 2022).....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian target Renstra Revisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024 telah dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, di dalam masa pandemi Covid-19 yang telah melanda bangsa Indonesia yang tentunya sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia.

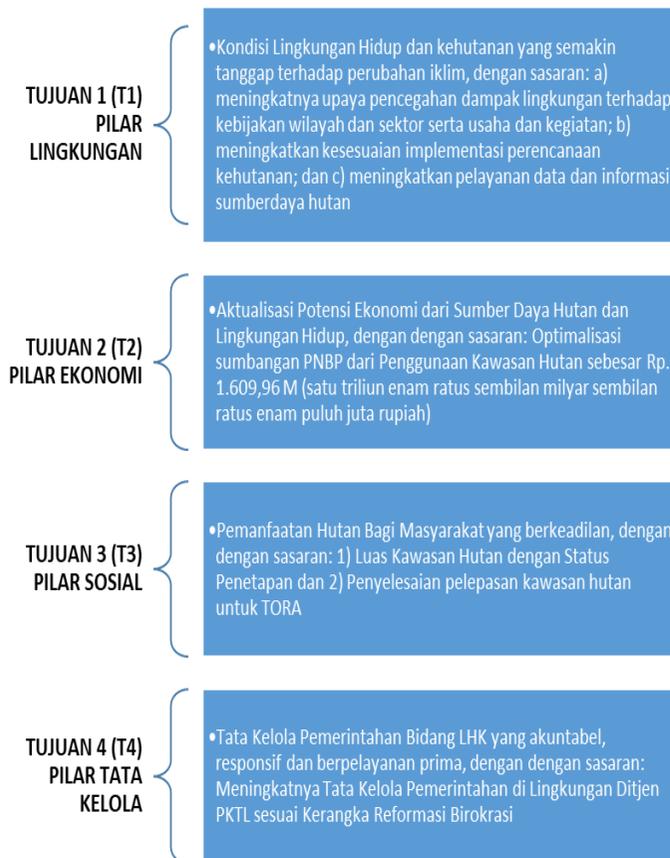
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan VII Makassar telah melakukan berbagai strategi dalam memberikan dukungan terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19 (*Refocusing*), penguatan kegiatan Perencanaan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan lainnya melalui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Terkait dengan hal tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2023 ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar terus berupaya bangkit dan beradaptasi menghadapi dampak pandemik tersebut melalui Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tema pembangunan ini diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Dengan dukungan anggaran yang ada, beberapa langkah yang dilakukan pada tahun 2022 diantaranya percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja, penguatan pengendalian lingkungan hidup, serta

perecepatan penyelesaian penyusunan rencana kawasan hutan dalam rangka Implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* di tingkat tapak

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar berupaya mengoptimalkan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, memperhatikan mainstream rencana pembangunan tahun 2023 tersebut dan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan LHK tahun 2023 tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar juga berperan aktif dalam 4 (empat) pilar.



Gambar 1. Pilar Pembangunan (Tujuan) LHK tahun 2023

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah (BPKHTL) VII Makassar memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian sasaran kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal ini berarti bahwa BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Di sisi lain, program dan kegiatan yang diemban oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar diharapkan terintegrasi dengan program-program kewilayahan daerah dalam wilayah kerjanya.

Untuk itu, perencanaan pada BPKHTL Wilayah VII Makassar harus disusun dengan baik melalui analisis yang tepat serta menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun legal-formal.

Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Disamping itu, dalam rangkaian proses perencanaan yang terarah, terpadu dan teranalisis, rencana kerja BPKHTL Wilayah VII tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat Renstra BPKHTL Wilayah VII tahun 2020 – 2024 yang dioperasionalkan secara detail guna pencapaian prioritas nasional pemantapan kawasan hutan dalam kurun waktu tersebut, sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2023 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan penetapan anggaran dan kegiatan tahun 2023 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Adapun tujuannya adalah :

- Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2023 lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar bersinergi dengan RKP.
- Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang mendukung pencapaian program, sasaran dan kebijakan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan Kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan Kawasan hutan, persetujuan pelepasan Kawasan hutan, dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan Kawasan hutan, penatagunaan Kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta data dukung daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup dan daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup dan strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

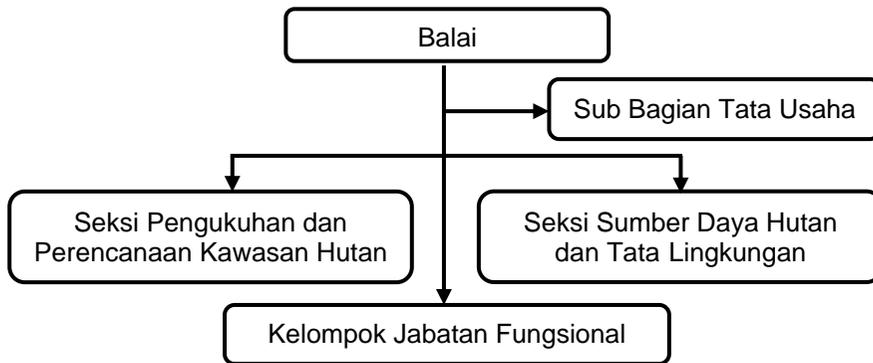
1.3. Struktur Organisasi dan SDM

Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

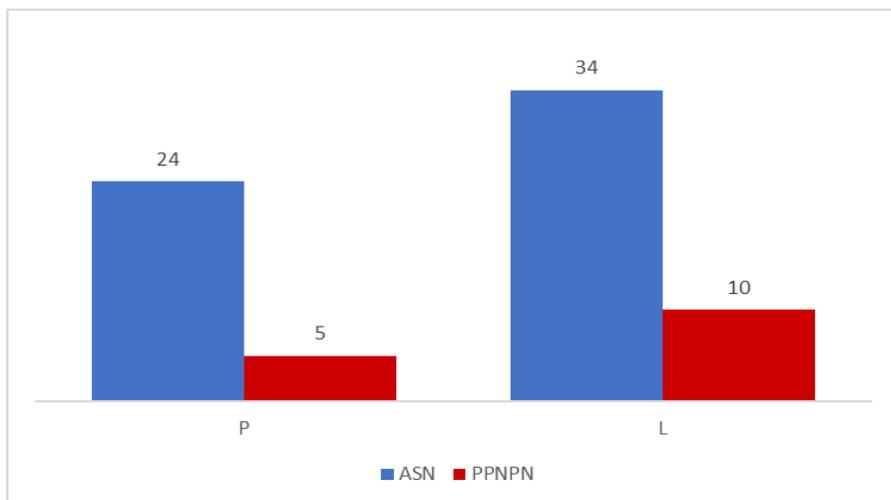
Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar

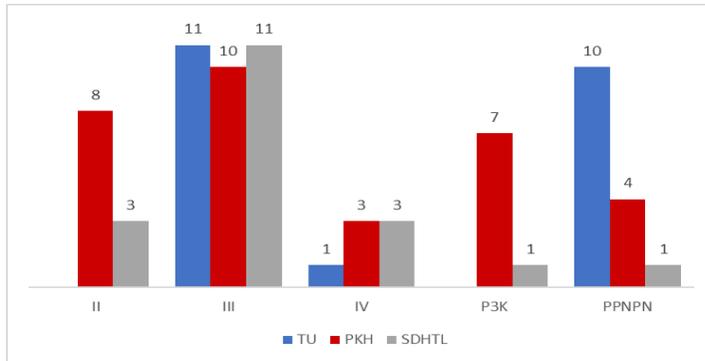
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 73 orang yang terdiri atas 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK 8 orang dan 15 Pegawai Kontrak dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang atau sekitar 60,27% dari total pegawai dan pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 29 orang atau 39,73%.

Pada Tahun 2023 ini, ada 8 orang PPPK yang ditempatkan di BPKHTL VII Makassar dengan jabatan Fungsional PEH. Sebanyak 3 orang merupakan pegawai yang berasal dari PPNPN BPKHTL Wilayah VII Makassar.



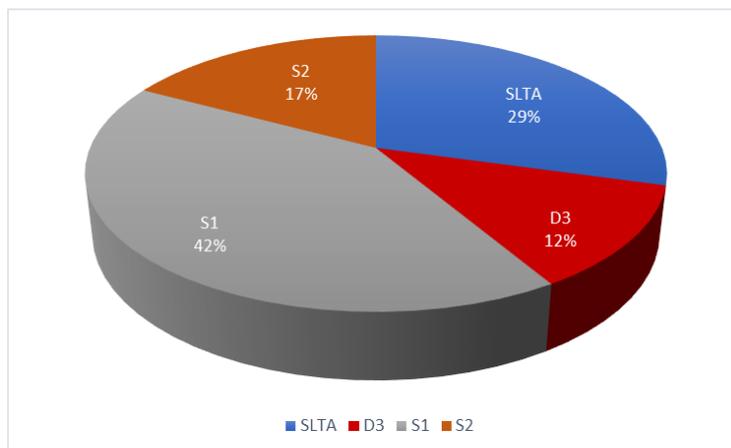
Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar

Berdasarkan golongan, pegawai negeri sipil Golongan III mendominasi jumlah pegawai keseluruhan yaitu 33 orang atau 43,8% yang penyebarannya merata di Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan.



Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data sebaran pegawai menurut tingkat pendidikan Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, pegawai paling banyak berpendidikan S1. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai dikelompok pendidikan ini sebanyak 33 orang (45,2% dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan SLTA sebanyak 23 orang (31,5%), kelompok pendidikan S2 sebanyak 10 orang (13,7%) dan Diploma III sebanyak 7 orang (9,6%).



Gambar 5. Sebaran Pegawai Lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah rincian Pegawai BPKHTL Wilayah VII Makassar :

- Kepala Balai : 1 orang
- Sub Bagian Tata Usaha : 8 orang
- Seksi PKH : 3 orang
- Seksi ISDHL : 2 orang
- Fungsional PEH : 38 orang
- Fungsional Arsiparis : 1 orang
- Fungsional Surveyor Pemeta : 3 orang
- Fungsional Pranata Keuangan APBN : 1 orang
- Fungsional PBJ : 1 orang
- Tenaga Kontrak SKMA : 3 orang
- Tenaga Kontrak Administrasi : 12 orang

Semakin meningkatnya kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan adanya tugas dan fungsi tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Oktober tahun 2023 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; serta pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan tahun 2022, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.1 Capaian Tahun 2021

Tahun 2021, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan sebagai *outcomes* Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2021, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2021

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	771 Km	846,59 Km	100
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	2 Provinsi	2 Provinsi	100
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5 Klaster	5 Klaster	100

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Menggunakan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Unit	4 Unit	100
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, aefektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	83 poin	76,85 poin	100
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	4 Level	3 Level	100
			Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100

a. Terelesaiakannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan

1) Terelesaiakannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan (Reguler)

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan prioritas nasional terkait percepatan tata batas, BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan tata batas luar kawasan hutan (reguler) di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 846,59 km yang tersebar pada 7 kabupaten dan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 136,47 km yang tersebar pada 4 kabupaten.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, target awal kegiatan tata batas adalah 771 km namun ada penambahan sebesar 75,59 km dari target tata batas 2023 sehingga realisasi tata batas tahun 2021 menjadi 846,59 km. Di Provinsi Sulawesi Barat, target awal kegiatan tata batas adalah 124 km namun ada perubahan batas kawasan hutan sehingga adanya penambahan sebesar 12,47 km.

Pelaksanaan tata batas luar dan fungsi dilaksanakan untuk mendukung penetapan kawasan hutan seluas ± 22.685,21 Ha di Provinsi Sulawesi Selatan dan ± 8.098,36 Ha di Provinsi Sulawesi Barat.

2) Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan prioritas nasional terkait reforma agraria pelepasan kawasan hutan, dan sebagai tindak lanjut dari hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA) tahun 2021 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 318 km dan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 86 km.

b. Tersedia dan Termutakhirkannya data dan informasi Sumber Daya Hutan

1) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Dalam rangka penaksiran sumberdaya hutan maka pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan dengan membuat plot--plot temporer dan permanen berupa klaster secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi mewakili keragaman tipe dan stratifikasi hutan di Indonesia. Kegiatan Enumerasi TSP/PSP yang dilakukan adalah bagian dari *National Forest Inventory* (NFI). Di dalam plot contoh NFI terdapat plot contoh sementara (*Temporary Sample Plot*) dan plot contoh permanen (*Permanent Sample Plot*). TSP diukur hanya satu kali untuk mengetahui kondisi potensi tegakan pada saat dilakukannya kegiatan enumerasi (*current standing stock*). Sedangkan PSP diukur ulang dalam selang waktu 4 sampai 5 tahun untuk memperoleh gambaran kondisi hutan yang terus berubah secara dinamis. Menyadari bahwa sumberdaya hutan bersifat dinamis, oleh karena itu diperlukan pemantauan sumberdaya hutan yang terus menerus agar selalu diperoleh data sumberdaya hutan yang time series.

Tahun 2021, BPKHTL Wilayah VII Makassar menargetkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan Enumerasi sebanyak 3 (tiga) klaster dan Re-Enumerasi sebanyak 2 (dua) klaster Provinsi Sulawesi Selatan dan target tersebut terealisasi seluruhnya.

2) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Penutupan lahan merupakan salah satu data dan informasi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selalu mengalami perubahan cepat dan dinamis. Untuk menjamin ketersediaan data penutupan lahan secara berkesinambungan, akurat dan terkini maka dilakukan pemantauan terhadap

sumberdaya hutan dengan menggunakan bantuan data citra satelit secara periodik. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki peran penting dalam menghasilkan dan melakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Untuk itu, pada tahun 2021 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan pemantauan sumber daya hutan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional dan pengecekan lapangan di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui perubahan penutupan lahan terkini di lapangan yang belum terdeteksi oleh citra satelit yang dipakai.

c. Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan

Pengendalian pemantapan Kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk menghindari permasalahan tumpang tindih. Kegiatan pengendalian pemantapan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar berupa verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui ketepatan pembayaran PNBK-PKH dari pemegang IPPKH (wajib bayar). Pada tahun 2021 telah dilakukan Verifikasi PNBK-PKH secara *desk analysis* pada 4 WB di Sulawesi Selatan.

d. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL

1) Terlaksananya Layanan Perkantoran

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kegiatan, perlu didukung dengan manajemen layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2) Terlayannya dukungan manajemen Satker

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar diperlukan layanan dukungan manajemen satker. Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan

perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan layanan dukungan manajemen satker untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran telah terealisasi 100%.

3) Terlayannya Sarana Internal

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKHTL Wilayah VII Makassar cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan penyelesaian kawasan hutan tata batas reguler, sedangkan ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terbatas. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan hal penting dilakukan. Pada Tahun 2021 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 24 unit

4) Terlayannya Prasarana Internal

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKHTL Wilayah VII Makassar cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan tata batas kawasan hutan (reguler) dan juga inventarisasi sumber daya hutan. Hal tersebut membutuhkan kantor dengan fasilitas yang memadai (aman dan nyaman).

Untuk itu, tahun 2021 BPKHTL Wilayah VII Makassar akan melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan berupa :

- Pembangunan Pos Jaga
- Pembuatan Papan Nama Kantor

2.1.2 Capaian Tahun 2022

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan, BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, memiliki sasaran prioritas tahun 2022 berupa kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. Selain itu, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Tahun 2022, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan sebagai *outcomes* Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2022. Adapun prognosis capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2022 setelah adanya refocussing anggaran

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Provinsi	1 Provinsi	100
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	4 Klaster	4 Klaster	100

			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Unit	4 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	83 poin	76,85 poin	92,5
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	4 Level	3 Level	75
			Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100

a. Tersedianya Data dan Informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi

Pada tahun 2022, berdasarkan arahan dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 Regu dengan Lokus Kabupaten Gowa, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Bone – Kabupaten Soppeng. Di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 2 Regu dengan lokus Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

Lokus kabupaten tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa ada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar dari sekian banyak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu DAS Bila - Walanae; DAS Saddang; DAS Jeneberang, dan 2 DAS besar di Provinsi Sulawesi Barat yaitu DAS Lariang DAS Mamasa.

Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk mengoreksi dan memperbaiki data spasial jasa lingkungan hidup pengatur air dengan indeks tinggi di wilayah seluruh Indonesia dalam bentuk peta dengan skala informasi 1 : 250.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

- b. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH dilaksanakan dalam bentuk diseminasi Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pelaksanaan tata lingkungan khususnya di bidang kebijakan wilayah dan sektor.

- c. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH dilaksanakan dalam bentuk diseminasi Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pelaksanaan tata lingkungan khususnya usaha dan kegiatan.

- d. terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA

Reforma agraria adalah penataan asset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Reforma agraria merupakan komitmen presiden dan telah menjadi kebijakan nasional, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia dan membangun dari pinggiran.

Kawasan hutan memiliki peranan penting dalam skema redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria pelepasan kawasan hutan diyakini dapat mengatasi permasalahan utama kehutanan.

Pada tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan berada di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.500,99 Ha, sebanyak 5 regu.

- e. Tersedianya dan Termutakhirkannya Data dan Informasi SDH

- 1) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar menargetkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan Enumerasi sebanyak 3 (tiga) klaster dan Re-Enumerasi sebanyak 1 (satu) klaster Provinsi Sulawesi Selatan dan target tersebut terealisasi seluruhnya.

2) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan pemantauan sumber daya hutan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional dan pengecekan lapangan di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui perubahan penutupan lahan terkini di lapangan yang belum terdeteksi oleh citra satelit yang dipakai.

f. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan

Pengendalian pemantapan Kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk menghindari permasalahan tumpang tindih. Kegiatan pengendalian pemantapan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar berupa verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui ketepatan pembayaran PNBK-PKH dari pemegang IPPKH (wajib bayar). Pada tahun 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan Verifikasi PNBK-PKH secara *desk analysis* pada 17 Wajib Bayar di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan pengecekan lapangan hanya dilakukan pada 4 (empat) Wajib Bayar dan seluruhnya telah terealisasi.

g. Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Dit. PKTL

1) Terlaksananya Layanan Perkantoran

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kegiatan, perlu didukung dengan manajemen layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2) Terlayannya dukungan manajemen Satker

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar diperlukan layanan dukungan manajemen satker. Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan layanan dukungan manajemen satker untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran telah terealisasi 100%.

3) Terlayannya Sarana Internal

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKHTL Wilayah VII Makassar cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan penyelesaian kawasan hutan tata batas reguler, sedangkan ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terbatas. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan hal penting dilakukan. Pada Tahun 2022 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 48 unit

4) Terlayannya Prasarana Internal

Sebagai bentuk pemenuhan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar yang sebagian besar menggunakan GPS dan dalam rangka mendukung percepatan penetapan kawasan hutan pada tahun 2023, maka BPKHTL Wilayah VII Makassar telah membangun Tugu Base GPS. Hal ini dilakukan agar pelaksana kegiatan yang membutuhkan data receiver GPS Makassar tidak lagi bergantung kepada data dari pihak eksternal sehingga data dapat diolah lebih cepat.

2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

2.2.1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode pembangunan lima tahunan 2020-2024, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target pembangunan tahun berikutnya. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN per tanggal 30 Desember 2021, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 22.746.237.075,-** atau mencapai **99,99%** dari total pagu sebesar Rp **22.749.018.00,-**. Realisasi anggaran sebesar Rp. 22.746.237.075,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.543.685.534,- Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 2.590.971.262,- dan Belanja Barang Non Operasional Sebesar Rp. 14.611.580.279,-. Rincian realisasi anggaran Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	1.544.450.000	1.544.340.000	99,99
2.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan (PEN)	8.956.168.000	8.955.509.310	99,99
3.	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan (PEN)	2.668.602.000	2.668.582.000	100
4.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	336.817.000	336.815.065	100
5.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	184.579.000	181.542.904	99,98
6.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	233.896.000	233.896.000	100
7.	Layanan Perkantoran	7.354.971.000	7.354.655.694	100
8.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	526.535.000	526.340.632	99,96
9.	Layanan Sarana Internal	783.000.000	782.700.470	99,96
10.	Layanan Prasarana Internal	160.000.000	158.855.000	99,28
	JUMLAH	22.749.018.000	22.746.237.075	99,99

2.2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 berjalan, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2022. Terdapat Bokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga total pagu pada revisi pertama perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp 10.873.584.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Selanjutnya revisi kedua pada Bulan Desember 2022 terjadi perubahan pejabat administrator (Kepala Balai) pada BPKHTL Wilayah VII Makassar dan juga terjadi perubahan pagu, sehingga total pagu pada revisi kedua perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp 10.850.854.000,-. Hingga Bulan Desember, dilakukan revisi DIPA sehingga Pagu pada tahun 2022 sebesar **Rp. 10.849.687.522,-** (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilang Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

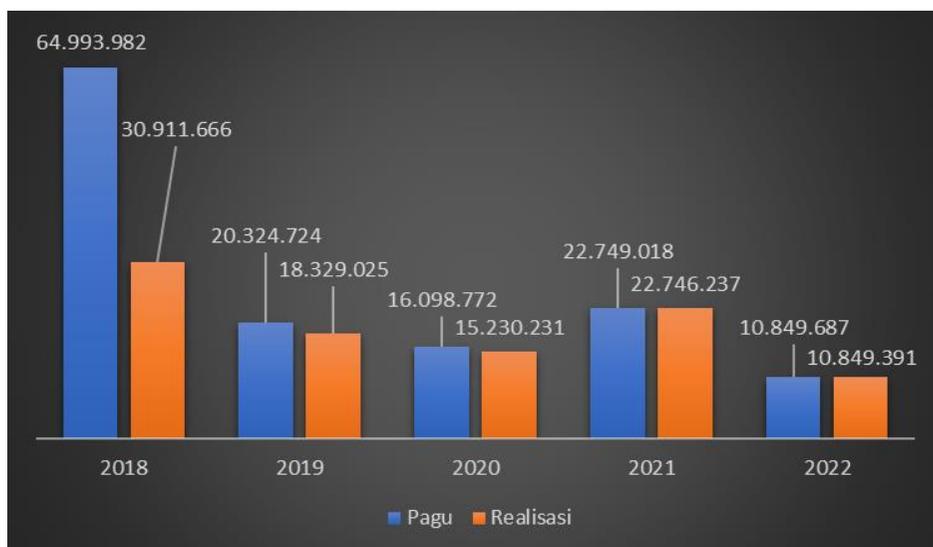
Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan Bulan Desember 2022, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun Anggaran 2022 telah mencapai **Rp. 10.849.391.263,-** atau **100%** dari total pagu sebesar **Rp. 10.849.687.522,-**. Adapun Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 (sampai dengan Desember 2022)

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Dokumentasi hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH	472.160.000	472.068.528	99,98
2.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan seKtor di wilayah kerja BPKH	18.525.000	18.524.510	100
3.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	9.760.000	9.760.000	100
4.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan	1.009.789.502	1.009.789.502	99,99

5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	320.000.000	319.996.740	100
6.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	252.520.000	252.320.000	99,92
7.	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	223.933.000	223.933.000	100
8.	Layanan Umum	496.079.520	496.078.790	100
9.	Layanan Perkantoran	7.491.947.500	7.491.947.193	100
10.	Layanan Sarana Internal	482.252.000	482.252.000	100
11.	Layanan Prasarana Internal	72.721.000	72.721.000	100
	JUMLAH	10.849.687.522	10.849.391.263	100

Adapun perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada lima tahun terakhir terlihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Terakhir dalam Ribu (2018 – Desember 2022)

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

3.1. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi Covid-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi

pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional, yaitu :

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 1 melalui kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan 100%.

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 3 melalui kegiatan Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH.

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

BPKHTL VII Makassar mendukung PN 6 melalui kegiatan Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH; Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH; Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH.

Pada prinsipnya BPKHTL Wilayah VII Makassar mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5. Dukungan BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2023 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan

untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
-------------------------------------	--	--	--

Prioritas Nasional 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

06- Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01- Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
----------------------------	--------------------	---	---

Prioritas Nasional 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang juga menjadi program yang didukung oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar yaitu :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program di atas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran program di atas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2023, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada BPKHTL Wilayah VII Makassar, antara lain:

1. Pecepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%
2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA

3. Optimalisasi penerimaan PNBP-PKH, termasuk penyelesaian piutang negara
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
6. Peningkatan akurasi data dan informasi SDH
7. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan
8. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Briokrasi Bersih dan Melayani; transisi Reformasi Struktural, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Satuan
Program Kualitas Lingkungan Hidup				
Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijaka usaha dan kegiatandi wilayah kerja BPKH	1	Layanan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1	Provinsi
	Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.607	Km
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	1	Klaster

		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	17	Unit
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layana publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3	Level
		Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VII Makassar Tahun 2023 merupakan rencana awal bagi BPKHTL Wilayah VII Makassar untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

BPKHTL Wilayah VII Makassar sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti :

1. Ketepatan waktu di dalam penyelesaian rekomendasi Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPTKH), untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan perubahan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana hal ini sangat berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA.
2. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang dalam Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH).
3. Dukungan dan kerjasama dari instansi/satuan kerja lainnya lingkup Kementerian Kehutanan.
4. Dukungan dari perusahaan yang menjadi wajib bayar untuk dapat mengumpulkan kelengkapan dokumen verifikasi PNBK-PKH.

Pada tahun 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp. 42.348,188.000,-** dimana 13,83% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 14,55% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 72% baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023 maupun prioritas bidang (Reguler). Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Pagu Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar TA 2023 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

PROGRAM	JENIS BELANJA / SUMBER DANA (dalam Ribu Rupiah)					TOTAL DANA (dalam Ribu Rupiah)	%
	BELANJA OPS			BELANJA NON OPS			
	PEGAWAI	BARANG		RM	PNP		
	RM	RM	PNP				
Program Dukungan Manajemen	5.865.538	2.698.601	3.454.152			12.019.291	28,38
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				13.286.417	16.942.480	16.998.717	71,38
Program Kualitas Lingkungan Hidup				100.000.000		100.000	0,24
						42.348.188	100

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Pada tahun 2023, seluruh kegiatan akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar, dengan KRO-RO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Sebaran KRO-RO pada Renja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
Pencegahan Dampak Lingkungan	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000

	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan	50.000.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	4.153.660.000
	Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	25.481.340.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	70.000.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	97.377.000
Perencanaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	426.520.000
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1.708.900.000
		Layanan Perkantoran	5.856.538.000
			1.789.701.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	2.664.152.000

Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas dan kebijakan prioritas pagu anggaran tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional menyebabkan target pencapaian prioritas nasional tidak dapat terpenuhi dan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan tidak merata. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target pada Rencana Kerja Tahun 2023 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar pada tahun 2023 untuk mewujudkan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2023 merupakan salah satu produk dari rangkaian aktifitas perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rencana ini dimaksudkan sebagai acuan penetapan anggaran dan kegiatan tahun 2023 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran tahun 2023 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar di tahun 2023 dalam bentuk DIPA TA 2023 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada pembangunan nasional, khususnya kehutanan dan tata lingkungan.

LAMPIRAN RENCANA KERJA BPKHTL WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	Komponen	Total	Lokus
Program Kualitas Lingkungan Hidup								
Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Pelayanan publik lainnya	Layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan	051 Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	50.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
		Pelayanan publik lainnya	Layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1	Layanan	051 Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	50.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	051 Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2.028.660.000	Kab. Pinrang, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto
						052 Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.300.000.000	Kab. Toraja Utara
						053 Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	825.000.000	Kab. Mamuju Tengah, Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Selayar
	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan	1	Rekomendasi Kebijakan	051 Penataan batas kawasan hutan (reguler)	25.481.340.000	Kab. Pinrang, Kab. Palopo, Kab. Luwu Timur, Kab. Bone, Kab. Toraja Utara, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Enrekang, Kab. Luwu Utara, Kab. Gowa
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan diperbaharui setiap tahun	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Layanan	051 Inventarisasi Hutan Nasional	61.865.000	Kab. Luwu Utara
						052 Dukungan pelaksanaan inventarisasi hutan nasional	8.135.000	

			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Layanan	051 Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	97.377.000	Kab. Bulukumba, Kab. Luwu
Perencanaan Kawasan Hutan	1. Perencanaan Kehutanan Terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100%	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	17	Badan Usaha	051 Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	426.520.000	PT. Arkamira Memorial Stone, PT. Celebes Bangun Jaya, PT. Citra Lampia Mandiri, PT. Semen Tonasa, PT. Vale Indonesia, PT. Wijaya Eka Sakti, PT. Anoa Hydropower, PT. Indosat, PT. UPC Sidrap Bayu Energi, PT. Usu Hidropower, PT. Vale Indonesia (PLTA Karebbe), PT. XL Axiata, PT. PLN
Program Dukungan Manajemen								
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1	Layanan	059 Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1.708.900.000	
			Layanan Perkantoran	1	Layanan	001 Gaji dan Tunjangan	5.856.538.000	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	111	Unit	051 pengadaan kendaraan bermotor	495.152.000	
						052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	1.597.000.000	
						053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	572.000.000	